

ANALISIS DAYA SAING EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUKANTO

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This research is aimed to know description of economic competitiveness in The Province of South Sumatra and to what extend the correlation between economic performance, local finance, and HDI to economic competitiveness. Data used is pooled data (2001-2005). The analysis are based on sum measurement such as mean, deviation standard, Klassen Typology and Rank Spearman. The findings show the form of new regency has lower ranking compare to old one. The top ranking of competitiveness is Palembang City, and the lower is OKU Timur Regency. The correlation between economic performance and economic competitiveness is 94,7 persen, while the correlation between local finance and economic competitiveness is 70,1 persen. finally correlation between HDI and economic competitiveness is 47,3 persen.

Keywords: Economic Competitiveness, GDP, Economic Growth, Income Per Capita, Inflation, Local Finance, Human Development Index (Hdi).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi (Mulyana, 2005: 2).

Konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi saat ini adalah berhadapannya seluruh daerah di wilayah nasional dengan tingkat persaingan yang semakin tajam secara langsung dalam pemasaran barang dan jasa, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah, termasuk sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia khususnya, merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya, dan memerlukan sumber daya yang besar. Pendekatan pokok utama dalam mengatasi tantangan tersebut adalah melalui percepatan pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah (<http://kawasan.bappenas.go.id>).

Tingginya tingkat persaingan antarnegara tidak hanya berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tetapi berdampak langsung pada perekonomian daerah pada

khususnya setelah pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Persaingan semakin tajam dalam meningkatkan daya saing daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan faktor penentu daya saing ekonomi. Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD dalam Kuncoro, 2005: 2).

Daya saing ekonomi suatu daerah merupakan topik yang menarik untuk dicermati karena globalisasi mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi semakin meningkat tajam dan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai daerah bagian di Indonesia mengikuti kecenderungan daya saing daerah yang berlaku. Peringkat daya saing daerah Sumatera Selatan pada tahun 2002 menempati urutan ke 16 dari 26 propinsi di Indonesia. Bahkan peringkat daya saing daerah propinsi Sumatera Selatan hanya menempati urutan kelima di Pulau Sumatera masih di bawah Lampung, Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Dilihat dari indikator yang membentuk perekonomian daerah yang meliputi Produk Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan keuangan daerah Propinsi Sumatera Selatan hanya menempati urutan ke 14 secara nasional. Sementara itu di Sumatera, Propinsi Sumatera Selatan menempati urutan ketiga di bawah Riau dan Sumatera Utara. Fakta ini sangat memprihatinkan mengingat Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan letak geografis yang strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah *pertama*; bagaimana daya saing ekonomi antardaerah di Propinsi Sumatera Selatan; *kedua*, bagaimana hubungan kinerja perekonomian daerah, keuangan daerah dan IPM terhadap daya saing ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional. Pengertian mencakup wilayah yang lebih luas seperti pulau atau propinsi, atau wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten/kota. Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Kemudian *Center for Regional and Urban Studies* (CURDS), Inggris, mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Abdullah, dkk. 2002: 13).

Menurut *World Economic Forum* (WEF) daya saing diartikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Definisi lain juga diungkapkan *Institute of Management and Development* (IMD) menyatakan daya saing nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengelola asset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu model ekonomi dan sosial (www.weforum.org).

Sementara itu Robiani dalam Novalia (2005: 16) menyatakan daya saing (*opportunities*) ditentukan oleh produktivitas suatu negara dalam menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modalnya. Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk

meningkatkan standar dan kualitas hidup serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar. Lebih lanjut daya saing untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis dalam proses produksi.

Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif.

Istilah keunggulan komperatif (*comperative advantage*) awalnya dikemukakan oleh David Ricardo, ulusan utamanya adalah perdagangan antarwilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan memperoleh keuntungan (Tarigan, 2005: 79).

Pada era globalisasi pemikiran tersebut mengalami perkembangan, keunggulan kompetitif mendapat perhatian yang relatif besar dibandingkan keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan daerah untuk memasarkan produknya ke luar daerah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi disuatu daerah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di daerah lainnya .

Pembangunan Ekonomi Daerah

Konsep pembangunan daerah merupakan hal penting untuk dibahas, hal ini disebabkan pengertian daerah berbeda tergantung dari aspek tinjauannya. Daerah aspek ekonomi daerah (*regional*) pembangunan ekonomi daerah memiliki tiga pengertian (Arsyad, 1999: 107) yaitu:

Pertama, suatu daerah dianggap sebagai ruang apabila kegiatan ekonmi terjadi dan didalam ruang (wilayah) tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis dan sebagainya. Daerah tersebut dinamakan daerah yang homogen;

Kedua, suatu daerah dianggap sebagai sutau ekonomi ruang yang dikuasi oleh suatu atau beberapa kegiatan ekonomi. Dilihat dari sisi ini daerah disebut daerah *nodal*.

Ketiga, suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Sehingga daerah dilihat dari sisi ini didasarkan pada pembagian wilayah administrasi suatu negara. Dalam pengertian ini wilayah disebut sebagai daerah admnistrasi.

Dalam konsep pembangunan ekonomi daerah, pengertian yang ketiga yang sering digunakan. Wilayah biasanya lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah nasional, pergerakan sumber daya antar daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar negara. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya rintangan berupa kuota dan tarif dalam perdagangan antar daerah.

Kemudian pembangunan ekonomi daerah itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna mendorong perkembangan ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat (Arsyad, 1999: 18).

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan *output* secara konstan dalam jangka panjang (Djojohadikusumo, 1994: 26). Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses terjadinya kenaikan PDB riil. Dalam pengertian ini perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. *Output* total riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan

(stagnasi). Perubahan ekonomi meliputi baik pertumbuhan statis atau penurunan pendapatan nasional riil. Penurunan merupakan perubahan negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan positif (Widjaja, 1997: 264-265). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi menurut definisi ini menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan *output* riil total lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi. Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Sjafrizal, 1997: 27-37). Kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah atau daerah yang bersangkutan.

Penelitian Terdahulu

Menurut *World Competitiveness Report* daya saing suatu negara sangat dipengaruhi oleh delapan faktor penentu, yakni: pertama, kekuatan ekonomi domestik; kedua, sumberdaya manusia (ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi); ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi (kapasitas Iptek yang unggul dan handal); keempat, manajemen (pengelolaan secara inovatif); kelima, internasionalisasi (derajat partisipasi suatu negara dalam perdagangan dan investasi internasional); keenam, pemerintah (iklim usaha yang kondusif); ketujuh, keuangan (kinerja pasar modal dan kualitas pelayanan lembaga keuangan); kedelapan, infrastruktur (industri dan perdagangan yang memadai) (www.bpk.lipi.go.id).

Penelitian Munit (www.muftiselangor.gov.my) yang membandingkan daya saing Selangor (Malaysia) terhadap 30 kota di 30 negara. Penelitian daya saing tersebut menggunakan empat variabel utama yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur dengan 72 indikator. Kinerja ekonomi diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, ekspor, neraca pembayaran, inflasi dan pendapatan per kapita. Hasil penelitiannya menunjukkan Kota Selangor memperoleh 77,3 persen indikator berperingkat ke 1 sampai dengan ke 20, dan disimpulkan Kota Selangor merupakan daerah yang mempunyai daya saing yang tinggi.

Sebuah kajian tentang daya saing daerah di Indonesia dilakukan secara komprehensif oleh Abdullah, dkk (2002, 25-44) untuk Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Kajiannya meliputi 26 propinsi di Indonesia, studi ini menentukan 9 kelompok indikator daya saing daerah, yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, dan manajemen dan ekonomi mikro. Dengan mengukur kinerja ke 26 propinsi di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, akhirnya diperoleh peringkat daya saing daerah di Indonesia. Hasil temuannya antara lain menyimpulkan bahwa DKI Jakarta menempati peringkat teratas sedangkan Aceh menempati peringkat terbawah. Studi ini juga membuat peringkat atas dasar masing-masing kelompok indikator, sehingga dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah.

Studi ini merupakan upaya pertama penyusunan daya saing daerah, namun studi ini tidak mempertajam analisisnya pada wilayah di dalam propinsi, sehingga penggerak utama dari daya saing ini tidak dapat diuraikan secara lebih jelas. Untuk dapat menentukan apakah daya saing yang dimiliki suatu daerah bersifat sementara atau lebih berjangka panjang, faktor-faktor utama penentu daya saing perlu dinilai, tidak hanya indikator umum yang mengukur keberhasilan kemajuan suatu daerah.

Hasil penelitian ini, khusus untuk daerah Sumatera Selatan menyatakan bahwa secara umum menempati peringkat ke 16 dalam peringkat daya saing nasional. Dari kesembilan

indikator tersebut Propinsi Sumatera Selatan hanya indikator sistem keuangan yang memiliki peringkat di atas rata-rata nasional yaitu peringkat ketujuh selebihnya berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan indikator yang lemah yaitu indikator infrastruktur, dan manajemen.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi 14 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Propinsi Sumatera Selatan sebagai daerah penelitian dengan alasan daya saing ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan masih relatif rendah

Sumber data dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan tahun pengamatan 2001-2005 dengan variabel meliputi kinerja perekonomian daerah, keuangan daerah, dan kualitas penduduk (IPM). Selanjutnya data *times series* dikombinasikan dengan *cross section* atau lebih dikenal *pooled data/data panel*). Periode tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan mulainya pemekaran daerah di beberapa kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan, dan ketersediaan data.

Dalam menganalisis daya saing ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan digunakan alat analisis baik deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan rata-rata, pertumbuhan, dan rasio. Berdasarkan acuan klasifikasi dari Kuncoro (2003; 182)

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{x} + SD$	$I \geq \bar{x} - SD$
Sedang	$\bar{x} \leq I < \bar{x} + SD$	$\bar{x} - SD \leq I < \bar{x}$
Rendah	$\bar{x} - SD \leq I < \bar{x}$	$\bar{x} < I \leq \bar{x} - SD$
Sangat Rendah	$I < \bar{x} - SD$	$I < \bar{x} + SD$
Ukuran Standar Deviasi	$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$	

Sumber: Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (2003; 182); dan *Metode Kuantitatif* (2004a: 38)

Keterangan: I = Nilai Indikator; \bar{x} = rata-rata; SD = Standar Deviasi

Sementara itu untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat menggunakan tipologi Klassen. Untuk melihat peringkat daya saing ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan (*overall*) akan dilakukan dengan cara menghitung rata-rata peringkat indikator utama, guna melihat sebaran variabel digunakan pula standar deviasi masing-masing daerah dari hasil pemeringkatan indikator.

Dalam pada itu untuk mengetahui indikator-indikator mana yang paling banyak memberikan kontribusi pada pencapaian daya saing ekonomi antardaerah di Propinsi Sumatera Selatan, maka digunakan perhitungan korelasi diantara peringkat indikator dengan peringkat daya saing daerah. Hasil perhitungan menggunakan formula korelasi *rank Spearman* (Mustapa, 2002: 13). Formula korelasi peringkat *spearman* sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

Keterangan: r_s = Koefisien korelasi rank order; 1 dan 6 = bilangan konstan; d = perbedaan antara pasangan jenjang; dan n = jumlah sampel

Bila koefisien korelasi r_s bernilai nol, maka tidak ada korelasi, dan bila r_s bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu hasil penelitian ini adalah bentuk peringkat daya saing ekonomi antar daerah di Propinsi Sumatera Selatan. Peringkat daya saing ekonomi ini secara umum menunjukkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lain dengan memperhatikan semua faktor yang dijadikan indikator.

Peringkat Indikator Kinerja Perekonomian

Peringkat kinerja perekonomian merupakan hasil perhitungan terhadap sub indikator yang terdiri dari: PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Dalam pemeringkatan ini hanya dilakukan sub indikator dengan migas, alasannya adalah dalam menghitung peringkat daya saing semua output harus dihitung tanpa harus membedakan migas dan non migas. Hasil perhitungan tersebut memberikan gambaran kinerja perekonomian daerah mana yang memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 1. menunjukkan bahwa Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Ogan Komering Ilir memiliki peringkat kinerja perekonomian terbaik. Bila dicermati dua kota yang memiliki peringkat tertinggi, sebagian besar mengandalkan sektor sekunder dan tersier. Sebagian besar peringkat sub indikator kinerja perekonomian Kota Palembang merupakan yang terbaik kecuali tingkat inflasi yang menempati urutan ke 13. Sementara itu Kota Lubuk Linggau mempunyai peringkat terbaik dalam pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Hal ini perlu diwaspadai mengingkat tingkat inflasi dapat berubah dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian kinerja Kabupaten Ogan Komering Ilir terbaik didukung oleh laju inflasi yang relatif rendah, hal ini disebabkan oleh sektor ekonominya ditopang oleh sektor pertanian, dimana harga relatif stabil.

Tabel 1. Peringkat Kinerja Perekonomian Daerah

Kabupaten/Kota	Peringkat Sub Indikator Kinerja Perekonomian				Kinerja Perekonomian
	PDRB	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kota Palembang	1	3	2	13	1
Kab. Ogan Komering Ilir	7	12	4	1	2
Kota Lubuk Linggau	13	9	1	2	3
Kab. Musi Rawas	5	6	10	6	4
Kab. Muara Enim	3	2	12	11	5
Kab. Lahat	6	7	6	10	6
Kab. Banyuasin	4	8	5	12	7
Kota Prabumulih	11	4	9	7	8
Kab. Ogan Komering Ulu	8	5	13	5	9
Kab. Musi Banyuasin	2	1	14	14	10
Kab. Ogan Ilir	10	11	8	4	11
Kab. OKU Timur	9	13	3	9	12
Kota Pagar Alam	14	10	11	3	13
Kab. OKU Selatan	12	14	7	8	14

Sumber: data yang diolah

Sementara itu daerah yang tergolong dalam klasifikasi menengah atau peringkatnya berada di sekitar nilai rata-rata peringkat adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih, sedangkan peringkat kinerja perekonomian terendah ditempati Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Kota Pagar Alam. Ketiga daerah merupakan hasil pemekaran tahun 2003-2004, sehingga kinerja perekonomian relatif terpuruk. Banyaknya dana untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas perkantoran menyebabkan anggaran pembangunan untuk masalah ekonomi sedikit terabaikan.

Indikator Keuangan Daerah

Menurut Balitbang Depdagri dalam Daud (2005: 17) untuk mengetahui besarnya kemandirian keuangan daerah digunakan ukuran yang disebut Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Akan tetapi dalam bahasan ini indikator keuangan daerah diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan teknik analisis kemuadian akan dibandingkan dengan standar Depdagri.

Tabel 2. Peringkat Keuangan Daerah Berdasarkan Klasifikasi

Kabupaten/Kota	Rasio PAD/PATDA	Klasifikasi	Peringkat
Palembang	10.76	T	1
Muara Enim	7.17	T	2
Lahat	4.69	S	3
Ogan Komering Ulu	4.38	S	4
Prabumulih	4.25	S	5
Lubuk Linggau	4.20	S	6
Musi Rawas	3.23	R	7
Ogan Komering Ilir	2.82	R	8
Ogan Ilir	1.90	R	9
Pagar Alam	1.84	R	10
Banyuasin	1.82	SR	11
Musi Banyuasin	1.70	SR	12
OKU Selatan	1.32	SR	13
OKU Timur	0.70	SR	14

Sumber: data yang diolah

Ket. T = Tinggi; S = Sedang; R = Rendah; SR = Sangat Rendah

Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: ada dua daerah yang memiliki klasifikasi tinggi yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, empat daerah dengan klasifikasi sedang secara berurutan yaitu: Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau. Daerah dengan klasifikasi rendah yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Pagar Alam. Sementara itu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, OKU Selatan, dan OKU Timur termasuk dalam klasifikasi sangat rendah (Tabel 2).

Walaupun ada daerah yang termasuk dalam klasifikasi tinggi, akan tetapi berdasarkan ketentuan Depdagri kemampuan keuangan daerah di Propinsi Sumatera Selatan masing-masing tergolong kurang dan sangat kurang. Daerah yang kemampuan daerahnya tergolong kurang hanya Kota Palembang (rasionya >10 persen), sementara 13 daerah lainnya tergolong sangat kurang.

Peringkat Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)

Indikator kualitas sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hanya dua daerah yang termasuk dalam

klasifikasi tinggi, tiga daerah klasifikasi sedang, dan delapan daerah klasifikasi rendah dan satu daerah klasifikasi sangat rendah. Daerah dengan klasifikasi tinggi yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih dan daerah dengan peringkat terbawah adalah Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 3. Peringkat IPM Berdasarkan Klasifikasi

Kabupaten/Kota	IPM	Klasifikasi	Peringkat
Palembang	72.24	T	1
Prabumulih	70.30	T	2
Pagar Alam	69.10	S	3
Ogan Komering Ulu	67.87	S	4
OKU Selatan	67.71	S	5
Musi Banyuasin	66.59	R	6
Muara Enim	66.21	R	7
Lahat	66.10	R	8
Ogan Komering Ilir	66.07	R	9
Banyuasin	65.98	R	10
Ogan Ilir	65.68	R	11
Lubuk Linggau	65.31	R	12
OKU Timur	65.14	R	13
Musi Rawas	63.33	SR	14

Sumber: data yang diolah

Ket. T = Tinggi; S = Sedang; R = Rendah; SR = Sangat Rendah

Menarik untuk dicermati, ada beberapa daerah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi justru IPMnya relatif kecil, misalnya Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, kedua daerah ini hanya menempati peringkat ketujuh dan keenam.

Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembahasan ini dilakukan pemetaan tipologi daerah terhadap 14 kabupaten/kota berdasarkan pengelompokan daerah ke dalam empat kuadran. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada Gambar V.1.

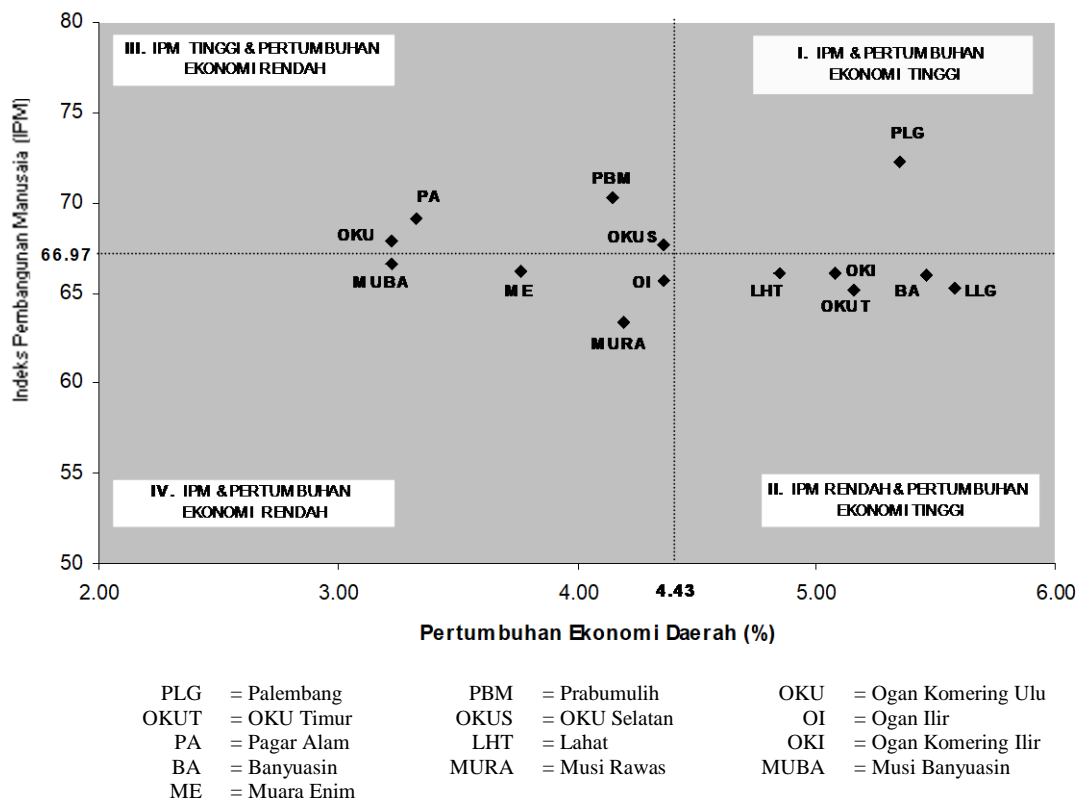
Gambar 1 merupakan hasil pemetaan tipologi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, daerah yang termasuk dalam klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi adalah Kota Palembang. Hal ini sekaligus menguatkan posisi Kota Palembang berada di posisi teratas dalam peringkat daya saing daerah;

Kedua, daerah yang berada pada kuadran kedua dengan klasifikasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur serta Kota Lubuk Linggau.

Ketiga, daerah yang berada dalam klasifikasi daerah dengan IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, serta Kota Prabumulih;

Keempat, sementara itu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam Pertumbuhan dan IPM yang rendah.



Gambar 1. Tipologi Daerah di Propinsi Sumatera Selatan Berdasarkan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan analisa empat kuadran terlihat bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki angka IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya nilai IPM ini terkait pula dengan indikator pembentuk IPM.

Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Per Kapita

Analisis Tipologi daerah didasarkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita, diperoleh tipologi daerah yang berbeda. Hasil pemetaan tersebut seperti pada Gambar V.2. Klasifikasi empat kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM tinggi (kuadran I) yaitu: Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

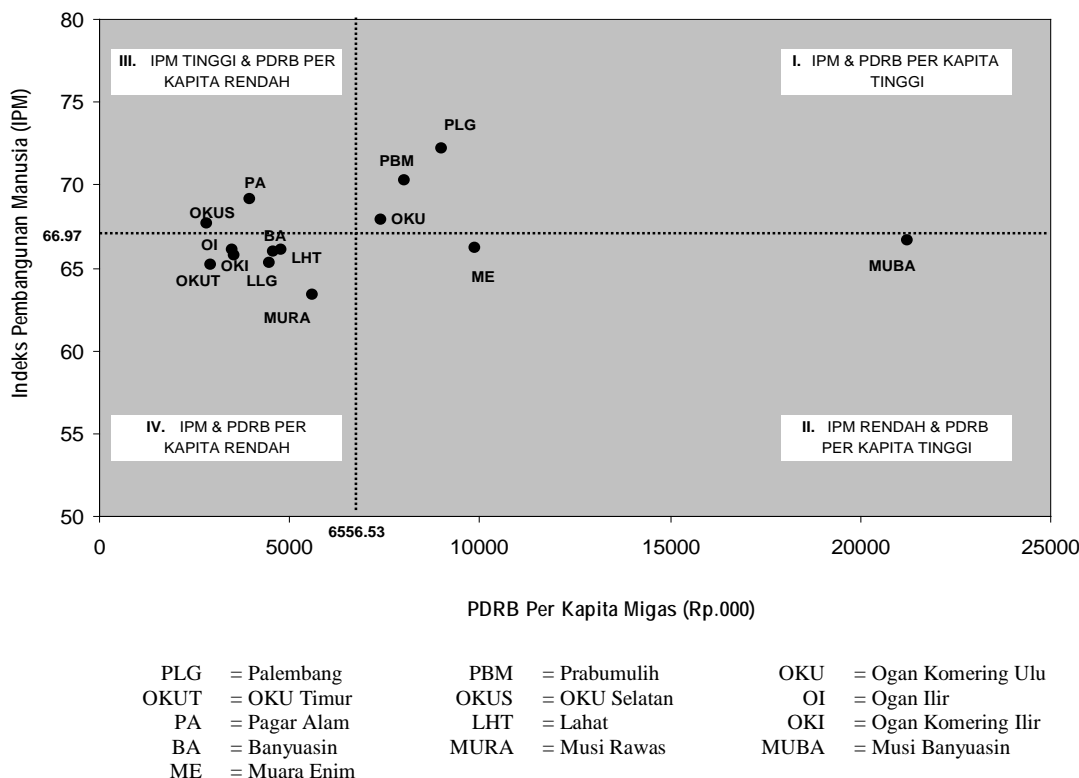
Kedua, daerah dengan pendapatan tinggi dan IPM rendah (kuadran II) yaitu: Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Muba;

Ketiga, daerah dengan IPM tinggi dan pendapatan per kapita rendah (kuadran III) yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Selatan;

Keempat, kelompok terakhir mempresentasikan daerah dengan IPM dan pendapatan per kapita rendah (kuadran IV) yaitu: Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuk Linggau.

Gambar 1 dan 2 mendeskripsikan bahwa Kota Palembang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan tergolong dalam daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi. Tentu ada alasan kuat kenapa untuk ketiga unsur tersebut Kota Palembang menunjukkan prestasi paling baik diantara daerah lain di Propinsi Sumatera

Selatan. Pembangunan fasilitas-fasilitas publik untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, ditambah lagi dengan peran swasta dalam penyediaan fasilitas-fasilitas yang sama seperti rumah sakit swasta dan sekolah-sekolah (dari taman kanak-kanak hingga SMA) dan perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta (PTS), serta pembangunan infrastruktur memang lebih baik di Kota Palembang dibandingkan di kawasan lainnya terutama daerah baru hasil pemekaran.



Gambar 2. Tipologi Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Berdasarkan IPM dan Pendapatan Per Kapita

Sumber: data yang diolah

Selain itu dari hasil pemetaan tersebut menarik untuk diamati adalah beberapa daerah yang tergolong dalam kuadran keempat. Secara teori daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi memiliki nilai IPM yang tinggi pula, namun ini hal tidak sepenuhnya terjadi, seperti yang dialami oleh Kabupaten Muba dan Kabupaten Muara Enim. Walaupun pendapatan per kapita kedua daerah tersebut tinggi akan tetapi IPMnya relatif rendah. Hal ini mengindikasikan pendapatan per kapita yang tinggi di kedua daerah tersebut belum merata dinikmati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor migas terhadap pembentukan PDRB kedua daerah ini. Sifat sektor pertambangan dan migas yang pada modal menyebabkan sektor ini relatif kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Khusus untuk Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan penelitian Nurlina (2004: 13) yang menyatakan 40 persen terbawah penduduk Kabupaten Muba menikmati pendapatan Rp105 ribu-Rp640 ribu (24 persen), 40 persen sederhana menikmati pendapatan Rp645 ribu-Rp980 ribu (39,56 persen), jika kedua klasifikasi ini dijumlahkan 73,65 persen penduduk Kabupaten Muba yang menikmati pendapatan yang rendah. Di pihak lain 5 persen berpendapatan paling tinggi menerima 14,65 persen dari seluruh pendapatan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Muba. Faktor ini diduga kuat menjadi alasan IPM di daerah tersebut rendah, selain tingginya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Inflasi yang tinggi berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat karena menyebabkan pendapatan

riil masyarakat berkurang.

Sementara itu hal serupa ditunjukkan Kabupaten Muara Enim, daerah ini memang mempunyai nilai yang baik dari indikator pendidikan, akan tetapi pertumbuhannya mengalami 'stagnan'. Pada tahun 2005 angka melek hurufnya tertinggi di Propinsi Sumatera Selatan akan tetapi pertumbuhannya nol, sedangkan rata-rata lama sekolah hanya 7,3 tahun sama dengan rata-rata lama sekolah daerah secara umum. Hal ini berarti rata-rata penduduk daerah ini hanya lulus sekolah dasar. Suatu dilema pula angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah rata-rata angka harapan hidup kabupaten/kota (66,6 tahun < 67,4 tahun).

Pemeringkatan Keseluruhan

Perhitungan dan pemeringkatan terhadap 14 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan menghasilkan suatu pola pemeringkatan secara keseluruhan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peringkat Keseluruhan Indikator Utama

Kabupaten/Kota	Peringkat Indikator Utama			Peringkat Keseluruhan
	Kinerja Perekonomian	Keuangan Daerah	IPM	
Kota Palembang	1	1	1	1
Kab. Muara Enim	5	2	7	2
Kota Prabumulih	8	5	2	3
Kab. Lahat	6	3	8	4
Kab. Ogan Komering Ulu	9	4	4	5
Kab. Ogan Komering Ilir	2	8	9	6
Kota Lubuk Linggau	3	6	12	7
Kab. Musi Rawas	4	7	14	8
Kota Pagar Alam	13	10	3	9
Kab. Banyuasin	7	11	10	10
Kab. Musi Banyuasin	10	12	6	11
Kab. Ogan Ilir	11	9	11	12
Kab. OKU Selatan	14	13	5	13
Kab. OKU Timur	12	14	13	14

Sumber: data yang diolah

Kota Palembang

Sebagaimana dapat diduga Kota Palembang memiliki daya saing ekonomi daerah relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Palembang merupakan sentral pembangunan selama perjalanan Orde Baru. Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah kebijakan pembangunan tersentralisasi di daerah TK I. Artinya penyediaan fasilitas penunjang pembangunan telah tersedia dengan baik.

Jika dilihat dari dekomposisi (penguraian peringkat) menurut indikatornya, maka peringkat daya saing ekonomi daerah Kota Palembang didorong oleh kinerja perekonomian daerah tersebut yang relatif lebih baik, kemandirian keuangan daerah, dan semua ini tercermin pula pada peringkat IPM yang tinggi. Secara spesifik satu faktor yang memperlemah kinerja perekonomian Kota Palembang adalah tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain (peringkat ke 13). Indikator yang lemah tersebut perlu mendapat perhatian apabila Kota Palembang ingin mempertahankan peringkatnya.

Kabupaten Muara Enim

Daerah Kabupaten Muara Enim menempati peringkat kedua, daerah ini mempunyai peringkat indikator utama di atas rata-rata yaitu peringkat dua sampai dengan lima. Indikator kemandirian daerah merupakan peringkat terbaik kedua setelah kabupaten Kota Palembang. Akan tetapi kabupaten ini lemah dalam pertumbuhan ekonomi (peringkat 12) dan terhambat oleh laju inflasi (peringkat ke 11). Dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia (IPM) daerah ini hanya menempati urutan ketujuh.

Upaya untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah perlu dikaitkan dengan faktor yang menjadi kekuatan, disamping memperbaiki faktor yang merupakan kelemahan daerah ini. Untuk itu perhatian pemerintah daerah diprioritaskan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (IPM).

Kota Prabumulih

Daya saing ekonomi Kota Prabumulih termasuk dalam peringkat tiga teratas, angka IPM yang tinggi (peringkat kedua), dan keuangan daerah (peringkat kelima) mampu mengangkat daerah ini ke peringkat yang tinggi. Kelemahan utama daerah ini terletak pada masih rendahnya PDRB (peringkat ke 11), dan masih rendah pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fakta tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu memacu peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor jasa sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Lahat

Peringkat daya saing ekonomi Kabupaten Lahat mencapai peringkat keempat, faktor yang menjadi pendorong peringkat adalah aspek keuangan daerah. Akan tetapi lemah dalam peringkat IPM. Nilai IPM berada di bawah rata-rata IPM kabupaten/kota. Disamping itu tingginya laju inflasi turut pula menghambat daya saing ekonomi daerah ini.

Berdasarkan kenyataan tersebut, prioritas pembangunan daerah lebih diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu, peningkatan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Peringkat daya saing OKU relatif tinggi, dengan sebaran indikator yang relatif merata. Dua diantaranya memiliki peringkat keempat (keuangan daerah dan IPM) sementara itu kinerja perekonomian berada di bawah peringkat rata-rata. Perlambatan kinerja perekonomian daerah ini tercermin dari rendahnya pertumbuhan ekonomi dengan peringkat kedua dari urutan terakhir.

Daya saing daerah ini sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi jika beberapa indikator yang merupakan kelemahan daerah saat ini diperhatikan pemerintah. Perbaikan kinerja perekonomian terutama pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki peringkat keenam di Propinsi Sumatera Selatan. Kekuatan utamanya pada kinerja perekonomian dengan peringkat ketiga, sementara itu kelemahannya terletak pada masih rendahnya nilai IPM. Tingginya peringkat kinerja perekonomian daerah terutama didorong oleh rendahnya tingkat inflasi (peringkat pertama) dan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi (peringkat keempat), akan tetapi masih rendahnya

PDRB per kapita (peringkat ke 12) menjadi penghambat Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terkait pula dengan manasih rendahnya PDRB per kapita ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Hal yang perlu mendapat perhatian tersebut terutama perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan angka melek huruf. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disertai dengan rendahnya pendapatan per kapita dapat memunculkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Kota Lubuk Linggau

Kota hasil pemekaran tahun 2004 ini mampu berada di peringkat ketujuh, kinerja perekonomian daerah merupakan peringkat terbaik kedua secara umum. Tingginya peringkat kinerja perekonomian ini didorong oleh sub indikator pertumbuhan ekonomi menempati urutan pertama, dan inflasi yang menempati peringkat kedua, namun terhambat oleh masih rendahnya nilai PDRB peringkat ke 13 dan rendahnya nilai IPM berada pada peringkat di bawah rata yaitu peringkat ke 12.

Peringkat daya saing ekonomi dapat dilakukan dengan memperbaiki indikator yang merupakan kelemahan daerah tersebut. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan sumber penerimaan daerah, tidak hanya mengandalkan dari sektor tersier, akan tetapi sektor sekunder dan primer mengingat letak geografis daerah ini yang strategis.

Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas menempati peringkat kedelapan secara keseluruhan, indikator yang menonjol adalah kinerja perekonomian yang berada pada posisi keempat, relatif baiknya peringkat kinerja perekonomian didorong oleh baiknya peringkat sub indikator PDRB, PDRB per Kapita, dan inflasi yang berada pada posisi keenam.

Dari segi faktor kelemahan daerah, perhatian perlu diberikan pada kualitas sumber daya manusia (IPM) yang berada pada peringkat ke 14. Untuk itu kebijakan pemerintah daerah diprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, terutama melalui perbaikan sarana kesehatan, perbaikan angka melek huruf serta peningkatan daya beli masyarakat.

Kota Pagar Alam

Secara umum peringkat Kota Pagar Alam berada pada peringkat kesembilan, sebagian besar indikator yang menyebabkan daerah ini berada di urutan bawah. Kinerja perekonomian dan keuangan daerah terpuruk pada peringkat masing-masing 13 dan 10. Lemahnya kinerja perekonomian lebih lebih sebabkan masih rendahnya PDRB (urutan ke 14), rendahnya pertumbuhan ekonomi (peringkat ke 11), daerah ini hanya mencatatkan sub indikator inflasi (peringkat ketiga) sebagai penopang peringkat kinerja perekonomian.

Sementara itu indikator IPM (peringkat ketiga) dapat dijadikan acuan daerah ini untuk dipertahankan karena kualitas sumber daya manusia relatif menonjol dibandingkan indikator lainnya. Tingginya angka harapan hidup dan angka melek huruf mampu mengangkat peringkat kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Masih relatif buruknya kinerja perekonomian perlu mendapat perhatian dari pemerintah, perekonomian yang berbasis sektor tersier harus pula dimbangi dengan sektor primer terutama pertanian (agro bisnis) mengingat letak geografis daerah ini yang relatif baik untuk pertanian.

Kabupaten Banyuasin

Peringkat kabupaten berada pada urutan ke 10, sebaran peringkat cukup merata di sekitar peringkat rata-rata, dengan peringkat terbaik kinerja perekonomian (peringkat

ketujuh), indikator yang menjadi kelemahan adalah keuangan daerah berada pada peringkat ke 11, sementara itu kinerja perekonomian terhambat oleh tingginya laju inflasi (peringkat ke 12).

Masih rendahnya peringkat daya saing ekonomi daerah ini mengindikasikan pentingnya peran pemerintah dalam semua aspek, khususnya kemandirian keuangan daerah. Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut, sehingga diharapkan akan meningkatkan peringkat Kabupaten Banyu Asin di masa yang akan datang.

Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin menempati peringkat ke 11, indikator yang relatif baik peringkatnya hanya nilai IPM (peringkat keenam), akan tetapi kinerja perekonomian daerah dan keuangan daerah relatif terpuruk dengan peringkat di bawah rata-rata yaitu peringkat ke 10 dan 12.

Bila dilihat dari dekomposisi sub indikator yang menjadi kekuatan, pemilikan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi menyebabkan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat teratas dalam PDRB dan PDRB per kapita tertinggi di Propinsi Sumatera Selatan. Sementara itu rendahnya peringkat kinerja perekonomian disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi (masing-masing peringkat ke 14) sehingga belum mampu menarik kabupaten ini ke peringkat yang lebih tinggi.

Mengingat potensi ekonomi yang sangat tinggi khususnya yang tergambar dari PDRB dan PDRB per kapita, maka prioritas kebijakan pemerintah diarahkan untuk perbaikan kinerja ekonomi (peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi), dan peningkatan pendapatan asli daerah. Masih rendahnya PDRB tanpa migas memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor sekunder maupun tersier.

Kabupaten Ogan Ilir

Secara keseluruhan, Kabupaten Ogan Ilir menempati urutan ke 12 dalam peringkat daya saing ekonomi daerah. Tidak ada komponen indikator utama yang menonjol, semua peringkat berada di bawah rata-rata peringkat keseluruhan. Indikator kinerja perekonomian hanya menempati urutan ke 11, indikator kemandirian keuangan daerah peringkat kesembilan dan kualitas sumber daya manusia (IPM) peringkat ke 11. Hanya sub indikator inflasi yang mendapat peringkat relatif baik (peringkat keempat) selebihnya berada peringkat yang rendah.

Masih relatif terpuruknya peringkat daerah ini membawa kosekuensi pada kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah diupayakan untuk perbaikan ketiga indikator tersebut yaitu bagaimana memperbaiki kinerja perekonomian, meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten OKU Selatan

Kabupaten OKU Selatan berada pada peringkat ke 13, indikator utama yang menonjol hanya IPM (peringkat kelima) sedangkan dua indikator lain peringkatnya terpuruk, kinerja perekonomian dan keuangan menempati urutan 14 dan 13. Buruknya kinerja perekonomian daerah ini didorong oleh masih kecilnya pendapatan per kapita dan rendahnya PDRB.

Masih buruknya kinerja perekonomian menuntut pemerintah untuk mampu identifikasi sektor-sektor unggulan perlu untuk meningkatkan kinerja sektoral dalam rangka menggerakkan roda perekonomian daerah. Disamping itu rendahnya kemandirian keuangan daerah perlu pula mendapat perhatian pemerintah, untuk itu pengembangan sumber-sumber penerimaan perlu dikaji secara dalam.

Kabupaten OKU Timur

Kabupaten OKU Timur sangat terpuruk jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan yang tercermin dari peringkat daya saing ekonomi daerah ini pada posisi ke 14 (terbawah).

Keterpurukan daya saing ekonomi OKU Timur dapat dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkannya, khususnya indikator yang berada di posisi terbawah yaitu keuangan daerah (peringkat ke 14), IPM peringkat ke 13, serta kinerja perekonomian daerah berada pada posisi ke 12. Meskipun daya saing ekonomi daerah ini terendah secara keseluruhan, namun bukan berarti tidak ada sub indikator yang menonjol. Sub indikator pertumbuhan ekonomi (peringkat ke 3), akan tetapi tingginya pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menaikkan peringkat daerah ini ke peringkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan kenyataan di atas perhatian pemerintah perlu diberikan pada peningkatan kinerja perekonomian, kemandirian keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia apabila daerah ini ingin meningkatkan daya saing ekonomi.

Hubungan Indikator Utama Terhadap Pembentukan Daya Saing Ekonomi Antar Daerah

Untuk melihat indikator-indikator mana yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian daya saing ekonomi daerah, maka digunakan perhitungan korelasi diantara masing-masing peringkat indikator utama dengan peringkat daya saing ekonomi daerah. Dari hasil perhitungan dengan rumus statistik *rank Spearman* menunjukkan ada kaitan antara kinerja perekonomian terhadap daya saing ekonomi daerah. Nilai hubungan (r) sebesar **0.701 atau 70,1** persen, dan dapat disimpulkan bahwa diantara kedua variabel tersebut ada korelasi yang cukup kuat dan tidak bisa diabaikan. Artinya peringkat daya saing suatu daerah ditentukan oleh kinerja perekonomian daerah sebesar 70,1 persen, hal ini berarti peranan PDRB, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sangat diperlukan dalam usaha peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Kemudian kontribusi keuangan daerah terhadap daya saing daerah sebesar **0,947 atau 94,7** persen. Hubungan ini mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara kemampuan keuangan daerah dengan daya saing ekonomi daerah yaitu 94,7 persen. Pada bahasan sebelumnya secara eksplisit terlihat bahwa daerah yang mempunyai kemandirian keuangan daerah yang tinggi pada umumnya memiliki peringkat daya saing ekonomi yang tinggi.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan belum berperan kualitas sumber daya manusia (IPM) menentukan daya saing ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari nilai $r = 0,473$ atau **47,3** persen. Rendahnya kontribusi kualitas sumber daya manusia terhadap daya saing ekonomi mengindikasikan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Walaupun disadari beberapa daerah mempunyai PDRB, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan yang tinggi akan tetapi apabila dipetakan (tipologi daerah) hanya Kota Palembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi. Sedangkan daerah lain menunjukkan fenomena yang beragam. Hal ini dapat didukung pula oleh rendahnya hubungan (r) antara nilai kinerja perekonomian dengan kualitas sumber daya manusia (IPM) yaitu sebesar 0,125 atau 12,5 persen, dapat pula disimpulkan bahwa kinerja perekonomian belum mampu mendukung kualitas SDM. Memang dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kinerja perekonomian yang baik mampu meningkatkan kualitas SDM yang baik, tetapi juga sebaliknya yaitu karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka kinerja perekonomian akan menjadi baik. Namun interpretasi yang paling utama adalah jika suatu daerah ingin membangun perekonomian maka kualitas sumber daya manusia jangan diabaikan, demikian pula

sebaliknya jika ingin mengembangkan SDM, juga tidak bisa mengabaikan kinerja perekonomian.

PENUTUP

Kesimpulan

Perhitungan dan pemeringkatan daya saing ekonomi antardaerah yang dilakukan terhadap 14 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran tentang posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dengan memperhatikan semua faktor yang dimiliki daerah serta seberapa jauh realisasi dari penggunaan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hasil perhitungan secara keseluruhan menunjukkan suatu pola daya saing antardaerah sebagai berikut: peringkat teratas di dominasi oleh kabupaten/kota lama sementara itu peringkat terbawah ditempati daerah-daerah baru hasil pemekaran. Kota Palembang memiliki peringkat teratas, daerah ini memiliki peringkat utama di semua indikator utama. Selanjutnya berturut-turut Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur.

Gambaran lain yang dapat disimpulkan dari hasil pemeringkatan daerah adalah terpuruknya peringkat Kabupaten Musi Banyuasin (urutan ke 11), bila dilihat dari dekomposisi indikator utama, daerah ini lemah dalam kinerja perekonomian terutama sub indikator pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Selain itu rendahnya kemandirian daerah (peringkat ke 12) menjadi kendala bagi daerah ini untuk menempati peringkat yang lebih tinggi.

Kontribusi indikator-indikator terhadap pembentukan daya saing ekonomi antardaerah di Propinsi Sumatera Selatan menunjukkan kontribusi terbesar yaitu indikator keuangan daerah ($r = 94,7$ persen), kemudian kinerja perekonomian daerah ($r = 70,1$ persen), dan terakhir IPM dengan ($r = 47,3$ persen).

Saran-Saran

1. Hasil pemeringkatan memberikan gambaran tentang posisi masing-masing daerah relatif terhadap daerah lainnya dalam hal kemampuan daya saing ekonomi. Untuk itu perlu tindak lanjut dari pemerintah daerah baik bersifat vertikal maupun horizontal. Perbaikan vertikal dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki daya saing ekonomi masing-masing daerah terhadap daerah lain. Namun sasaran ini belum tentu tercapai karena jika daerah lain melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik, maka bukan tidak mungkin sasaran vertikal peningkatan daya saing menjadi tidak tercapai bahkan bisa menjadi turun. Dalam hal ini upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih bersifat horizontal. Artinya, walaupun secara vertikal tidak menjadi lebih baik tetapi secara kualitas masing-masing daerah akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Masih relatif rendahnya kemandirian keuangan daerah di Propinsi Sumatera Selatan sehingga diperlukan peningkatan penerimaan asli daerah terutama dari sektor pajak guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.
3. Masih rendahnya kontribusi IPM terhadap pembentukan peringkat daya saing ekonomi dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan daerah pada khususnya, maka program peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui

pengembangan investasi sosial di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan masyarakat

4. Penelitian hanya menggunakan tiga indikator utama (kinerja perekonomian, keuangan, daerah), hal ini dikarenakan ketidaktersidan data. Untuk itu pengembangan konsep dan penelitian lebih lanjut dalam mengukur peringkat daya saing ekonomi antardaerah kabupaten/kota sangat diperlukan mengingat fokus otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota; kemudian variabel yang dirasa relevan dalam mengukur daya saing ekonomi antardaerah perlu ditambahkan ke dalam model perhitungan. Selain itu, untuk evaluasi terhadap daya saing ekonomi daerah diperlukan penelitian secara berkala hal ini disebabkan adanya daerah hasil pemekaran yang belum dimasukkan dalam perhitungan peringkat daya saing ekonomi antardaerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah, Piter., Armida S. Alisjahbana., Nurry Effendi, dan Boediono. 2002. *Daya Saing Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- BPS. 2006. *Sumatera Selatan dalam Angka*. Bappeda Sumatera Selatan-BPS
- BPS. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto*. Bappeda Sumatera Selatan-BPS
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- _____. 2004a. *Metode Kuantitatif*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mulyana, Andy. 2005. "Peluang Investasi Sektor Perkebunan Di Propinsi Sumatera Selatan". Makalah pada Seminar Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi Fiskal, Moneter, dan Perbankan. Kerjasama FE Unsri – BI Palembang. 7 Juni.
- Munit, Abdul Bin Kasmin. 2005. *Petunjuk Pembangunan Ekonomi*. <http://www.muftiselangor.gov.my/KoleksiDownload/download/14%20prosiding.pdf>. diakses tanggal 7 Januari 2007.
- Mustafa, Hasan. 2002. "SDM dan Otonomi Daerah". dalam <http://www.smeru.or.id> diakses 23 Februari 2007.
- Novalia, Nurkardina. 2005. "Analisis Daya Saing Industri Agro Indonesia". *Tesis*. PPS Unsri Tidak dipublikasikan.
- Nurlina, dan Zainab Bakir. 2004. "Strategi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Untuk Mengatasi Permasalahan Sumber Daya Manusia (Kasus Sumatera Selatan). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6 No.1 Februari. BPFE Unsri.
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", *Prisma*, LP3ES No. 3 Tahun XXVI.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaja, Farid M. 1997. *Ekonomi Makro*. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- www.bpk.lipi.go.id/PortalVB/uploads/KONFLIK%2520%26%2520DAYASAING.doc+ukuran+daya+saing++investasi+&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=5, diakses 23 september 2006.
- www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2006_rankings.xls, diakses 8 Februari 2007
- "Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah". http://kawasan.bappenas.go.id/kajian/datakajian/kajian_klaster.pdf. diakses 8 Februari 2007